



Lima Hari Kerja Diterapkan

YOGYAKARTA (SI) – Prauji coba model kedua lima hari kerja bakal dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta selama sebulan, mulai 30 November hingga 30 Desember 2009. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan dilakukan hingga sore hari.

Kepala Sub-Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta Fatma Rosyani mengatakan, penerapan prauji coba lima hari kerja membuat waktu kerja staf/karyawan pemkot berbuah. Senin-Kamis, mereka bekerja sejak pukul 07.30-15.45 WIB. Waktu istirahat selama setengah jam dengan sistem giliran. Sementara Jumat, staf/karyawan pemkot bekerja dari pukul 07.30-15.30 WIB dengan waktu istirahat selama 1,5 jam mulai 11.30-13.00 WIB.

"Awalnya prauji coba ini akan

dilaksanakan selama sepekan. Setelah dievaluasi yang berdasarkan indikator efektivitas dan efisiensi sumber daya, maka akan diperpanjang selama sebulan," kata Fatma Rosyadi kepada wartawan kemarin.

Jika pelaksanaan lima hari kerja berselang-seling dan hanya dilaksanakan selama sepekan, malah akan membingungkan masyarakat. Rencananya, uji coba lima hari kerja akan dilaksanakan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2010.

"Sepekan prauji coba lima hari kerja. Lalu, tiga pekan berikutnya enam hari kerja. Lalu, awal tahun uji coba lima hari kerja dilaksanakan. Itu akan membingungkan masyarakat. Akhirnya kami memutuskan prauji coba model kedua ini kami laksanakan selama sebulan penuh," ungkap Fatma.

Tahapan pelaksanaan lima hari kerja dimulai dengan prauji coba, uji coba, dan penerapannya. Urut-

urutan itu berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Pembedayaan Aparatur Negara No 8/2008 tentang Pedoman Hari Kerja Instansi Pemerintah.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Setda Kota Yogyakarta Herman Edy Sulistyono menerangkan, prauji coba lima hari kerja model pertama sudah dilaksanakan pada pekan pertama November.

Pada prauji coba pertama, sistem lima hari kerja berlangsung tanpa waktu istirahat. Dari hasil evaluasi, sebagian besar pegawai lebih memilih penerapan lima hari kerja dengan waktu istirahat. "Bagaimanapun, pegawai membutuhkan waktu istirahat selama mereka bekerja," ujarnya.

Pada prauji coba model kedua ini, masing-masing SKPD harus menyerahkan hasil evaluasi paling lambat 15 Desember.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Humas dan Informasi			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005